

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu karakteristik syariat Islam adalah cakupannya yang komprehensif. Tidak ada satu pun dalam aturan kehidupan yang tidak termuat dalam syariat tersebut meskipun bersifat implisit. Karena itu dalam teks-teksnya, kita dapat hukum-hukum mengenai ibadah, akhlak, aqidah dan muamalat dengan maknanya yang luas mencakup pengaturan hubungan-hubungan perseorangan dengan sesamanya, baik secara individual maupun sosial. Hal ini terungkap dalam Al-Qur'an surah al-An'am ayat 38 :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ ۗ مَا فَرَقْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ¹

Artinya : dan Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.²

Sebahagian mufassirin menafsirkan Al-Kitab itu dengan Lauhul mahfudz dengan arti bahwa nasib semua makhluk itu sudah dituliskan (ditetapkan) dalam Lauhul mahfudz. dan ada pula yang menafsirkannya dengan Al-Quran dengan arti: dalam Al-Quran itu telah ada pokok-pokok agama, norma-norma, hukum-hukum, hikmah-hikmah dan pimpinan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat, dan kebahagiaan makhluk pada umumnya.

¹ Q.S Al-An'am Ayat 38

² Mushaf Madinah, *Al-Quran Terjemahan dan Tafsir*, (Bandung: Jabel) Q.S Al-An'Am ayat 38

Kandungan ayat diatas mendukung paradigma pemikiran bahwa agama Islam serba lengkap dan di dalamnya terdapat berbagai sistem kehidupan seperti yang berhubungan dengan politik, kenegaraan, ekonomi, sosial dan sebagainya. Artinya Islam sebagai agama tidak hanya mengandung hal-hal yang berdimensi teologis-ritualistik saja, tetapi juga memberikan pedoman tentang sosial yang pragmatis. Dalam hal inilah Islam mempunyai dimensi politik dan kenegaraan yang di kenal dengan sebutan “*Al-Islam Din wa al-Daulah*” yang mengisyaratkan kedekatan agama dengan negara.

Meskipun kedekatan ini menunjukkan adanya keterkaitan dalam menekankan terwujudnya keselarasan antara kepentingan dunia dan akhirat, namun Al-Qur’an tidak memberikan rincian teknis penyelenggaraan negara, melainkan terdapat pernyataan-pernyataan global saja. Sehingga banyak perbedaan pandangan di kalangan para tokoh pemikir politik kenegaraan Islam dalam memahami dan menafsirkan ajaran Islam dalam hubungannya dengan politik dan pemerintahan.³

Di kalangan umat Islam terdapat tiga aliran tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan. *Aliran pertama*, adalah aliran yang berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian barat, yaitu hanya menyangkut hubungan antara manusia dengan tuhan, sebaliknya Islam adalah suatu agama yang sempurna dan yang lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan politik. Para pendukung aliran ini pada umumnya berpendapat bahwa :

1. Islam adalah suatu agama yang serba lengkap. Di dalamnya terdapat pula antara sistem ketatanegaraan atau politik. Oleh karena itu, bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam, dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan barat.
2. Sistem ketatanegaraan atau politik Islami yang harus diteladani adalah sistem yang telah di laksanakan oleh Nabi Muhammad dan oleh empat al-khulafa’ al-Rasyidin. Tokoh utama dari aliran ini antara lain Hasan Al-Banna, Sayyid

³ Sirajuddin, *Politik Ketatanegaraan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2007) hal. 19-20.

Qutubh, Muhammad Rasyid Ridha dan al-Maududi. Aliran ini sering di sebut aliran Tradisionalis.

Aliran Kedua adalah aliran yang berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini, Nabi Muhammad hanyalah seorang Rasul biasa seperti halnya rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur, dan Nabi tidak pernah di utus dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai satu Negara. Tokoh-tokoh terkemuka dari aliran ini antara lain Ali Abd Raziq dan Taha Husein. Aliran ini sering di namakan aliran sekuleris.

Aliran ketiga adalah aliran yang menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan. Akan tetapi aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat yang hanya mengatur antara hubungan manusia dan tuhan. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan Islam, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Diantara tokoh-tokoh dari aliran ini yang sangat menonjol adalah Muhammad Husein Haikal. Aliran yang ketiga ini dinamakan aliran modernis atau aliran subtansialis.⁴

Perbedaan pandangan ini membawa dampak pada persoalan antara Islam dan negara yang menjadi salah satu subyek pembahasan penting dalam masa modern ini. Apakah keduanya tidak ditempatkan pada kedua kutub yang berlawanan dalam artian bahwa pelaksanaanya harus secara integral dan seimbang ataukah keduanya terjadi deferensial seperti halnya kenegaraan barat dan Kristen. Atau mengambil sintesis dari keduanya, dimana Islam memandang bahwa urusan negara merupakan tugas keduniaan, tapi berdimensi keagamaan dapat di sesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar dari

⁴ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990) hal 1-2.

Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.⁵

Sehubungan dengan perbedaan pemahaman ajaran Islam, maka dalam hubungan agama dan negara pendapat pertama mengambil suatu paradigma, Hasan Al Banna adalah seorang yang menguasai fiqih dengan cukup banyak. Sekaligus orang yang menguasai problematika zamanya yang menimpa dunia barat dan Islam. Beliau juga orang yang mengikuti peristiwa-peristiwa dunia dan memahami hakikat peradaban barat sebagai peradaban hedonisme dan memanjakan nafsu.⁶

Hasan Al-Banna menegaskan bahwa Islam adalah agama yang sempurna yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Ia mengkritik pemisahan antara agama dan politik; dan menyatakan bahwa gerakan Islam yang menjauhkan dari tujuan-tujuannya, tidak bisa disebut sebagai gerakan Islam dengan pemahaman yang menyeruluh tentang Islam⁷

Hasan Al-Banna dengan lantang mengatakan, esensi seorang muslim tidak akan sempurna keislamannya sehingga ia menjadi seorang politikus yang berpandangan jauh ke depan, antusias dan memiliki ghirah terhadap semua permasalahan umatnya. Dapat saya katakan bahwa pembatasan dan pelucutan adalah sesuatu yang tidak di akui dalam Islam. Dan menjadi kewajiban setiap organisasi Islam menjadikan agenda utamanya adalah memperhatikan urusan umatnya secara politik, dan jika tidak maka ia masih memerlukan pemahaman makna kata Islam⁸

Sayyid Quthb dan Rasyid Ridha tampaknya memiliki pandangan yang sama. Di antara yang paling sentral dan mendasar ialah bahwa Islam adalah agama yang telah sempurna, tuntunanya tidak hanya meliputi bidang ibadah dan moral, melainkan mengandung ajaran-ajaran yang menuntun aspek kehidupan termasuk dalam bidang politik, ekonomi, sosial kemasyarakatan pertahanan keamanan dan sebagainya.

⁵ Sirajuddin, *Op.cit.*, hal 21.

⁶ Muhith Muhammad Ishaq, *Fiqih Politik Hasan Al-Banna*, (Jakarta: Rabbani press, 2012) hal. 13

⁷ *Ibid.*, hal. 29.

⁸ Abdul Hamid Al Ghazali, *Pilar-pilar kebangkitan umat*, (terj) khozin abu faqih. dan Fachrudin. (Jakarta timur: ,I'tishom cahaya umat 2011) hal. 190.

Karena itu umat Islam tidak mencontoh pola hidup barat dari segala seginya ketinggian Islam dalam ajaran-ajarannya justru menjadi pedoman dasar untuk melaksanakan aktivitas keduniaan dengan tujuan mengembalikan kejayaan Islam pada massa awal⁹

Hasan Al-Banna mendapati para penguasa negeri-negeri Islam terpengaruh oleh Eropa, terutama ketika mereka memisahkan agama dari politik dan pemerintahan. Beliau mengingatkan bahaya kesalahan yang dialami pemerintahan ini. Mereka menjauhkan Islam dari politik, administrasi, dan pengelolaan urusan umat. Beliau menyatakan bahwa pemerintahan dan para politisi di negeri kaum muslimin telah merusak cita rasa Islam di kepala mereka merusak pandangan yang Islami di dalam jiwa, dan telah merusak keindahan yang Islami dalam kenyataan. Karena keyakinan, pernyataan dan perbuatan mereka senantiasa menjauhkan arahan agama dari tujuan politik,. Beliau menyebut kondisi ini dengan kalimat.” Ini lah ketakutan dan kerusakan pertama¹⁰

Diantara yang di temukan oleh Hasan Al-Banna dan ia telah memperingatkan kaum muslimin tentang bahanya adalah serangan brutal barat terhadap Islam dan usaha mempeyoratifkan (mencitra burukan) Islam. Barat memberikan persepsi bahwa Islam sebagai agama penjajah dan mengekang kebebasan manusia. Barat pun menggambarkan Islam sebagai agama ibadah yang tidak ada hubunganya dengan pemerintahan, kekuatan militer, kesiapan politik, dan jihad. Barat mengkampanyekan bahwa Islam tidak menganut pemeluknya untuk membela dan memerdekakan negaranya dari penjajahan.

Buruknya masalah ini sudah samapai pada tingkat yang maksimal. Orang-orang yang dianggap berilmu, para ulama, dan orientalis yang memusuhi Islam dan kaum muslimin, mengumandang secara berulang-ulang kalimat kufur tersebut. Di antara mereka itu ada Ali Abdur-Razzaq yang menulis buku *Islam Wa Ushulul Hukmi* setahun setelah jatuhnya Daulah Utsmaniyah dan pengumuman Mustafa

⁹ Sirajuddin, *Op,cit.*, hal 23.

¹⁰ Muhith Muhammad ishaq, *Op,cit.*, hal 29.

Kamal Pasha Atatürk atas Negara sekulernya dan menjauhkan Islam dari realita kehidupan, serta memerangi semua simbol-simbol Islam dalam Daulah Utsmaniyah. Ia mendukung Atatürk dalam pemisahan politik dari agama: dan menolak dengan tidak tahu dan pura-pura tidak tahu bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan pemerintahan, tidak ada mendirikan Negara, bukan khilafah Islamiyah adalah keburukan bagi kaum muslimin.¹¹

Sebagian pemimpin arab tidak sungkan-sungkan mengungkapkan kekaguman mereka terhadap tindakan yang di lakukan Mustafa Kemal Attaturk, bahkan seorang ketua partai besar dan terkenal di Mesir, yang saat itu menjabat kursi perdana menteri mengatakan dengan terus terang, “ saya sungguh sangat kagum dan terkesan dengan pemahaman Kemal Attaturk terhadap arti negara modern”

Imperialisme yang menguasai masyarakat muslim mampu menanamkan satu pemikiran yang aneh di dalam akal dan jiwa mereka. Bahwa Islam adalah agama dan bukan daulah. agama itu sendiri menurut pengertian Barat, bagaimana ia mengartikan agama. Urusan daulah tidak ada kaitannya dengan agama, hal ini merupakan produk akal manusia semata, sesuai dengan pengalaman dan kondisi di sekitarnya. Diantara fenomena keberhasilan invansi intelektual yang dilancarkan dunia barat bahwa pemikiran *sekulerisasi* yang menyusup dan menyerukan pemisahan agama dan daulah. *Sekulerisasi* adalah satu paham yang ingin memisahkan atau menetralsir semua bidang kehidupan, seperti politik dan kenegaraan. Maka dalam Islam tidak dikenal dikotomi antara agama (Islam) dan (Negara). Dengan istilah *sekulerisme* dimaksudkan bahwa kehidupan temporal sama sekali tidak ada kaitannya dengan kehidupan spiritual ”¹²

Musuh-musuh Islam telah berhasil menipu kaum intelek muslim dan meletakkan tabir penghalang yang tebal di mata orang-orang yang mempunyai ghirah terhadap Islam dengan cara menggambarkan islam secara sempit, yaitu hanya terkait dengan masalah-masalah akidah, ibadah dan akhlak, lalu di tambahkan padanya beberapa

¹¹ *Ibid*, hal 33-34.

¹² Yusuf Qardhawy, *Fiqh Negara*, (terj), Syafril Halim, (Jakarta: Rabbani Press, 1997) hal 9-10.11.

perbuatan yang di luar nalar manusia, khurafat, dan formalitas-formalitas keagamaan yang tidak bermakna. Tipu daya tersebut didukung oleh kurang berilmunya kaum muslimin terhadap hakikat agamanya, sehingga sebagian besar dari mereka menerima dengan sepenuh hati dengan persepsi tersebut. Persepsi tersebut melekat begitu lama pada mereka sehingga sangat sulit kita untuk memahami salah seorang dari mereka bahwa Islam adalah sebuah sistem sosial paripurna yang mencakup seluruh aspek kehidupan.¹³

Setelah membangun argumen bahwa Islam datang dengan politik yang membahagiakan seluruh manusia, dan menegaskan dengan teks dari Al-kitab dan As-sunnah, serta menjelaskan bahwa pemisahan agama dari politik adalah virus barat yang menular kepada para pemimpin pemerintahan kaum muslimin di negeri-negeri kaum muslimin, Hasan Al-Banna mengumumkan bahwa Ikhwanul Muslimin adalah sebuah gerakan Islam yang menyerukan Islam dengan pemahaman yang konferhensif. Islam yang berdiri mengelola, dan mengatur seluruh urusan manusia.¹⁴

Dalam kondisi seperti inilah muncul sebuah tuntutan untuk membuat suatu kajian mengenai pemikiran perpolitikan dalam Islam dengan cara yang ilmiah guna untuk memikirkan kembali makna, hakikat dan tujuan dan mamfaat yang sebenarnya. Dari kajian yang tersistematis ini dapat banyak membantu dari berbagai macam pemikiran serta dapat menanggapi orang-orang yang beranggapan bahwa tidak ada satupun yang dapat digunakan sebagai teori dalam konsep negara maupun sebagai pemikiran politik Islam. Dan semoga kajian ini dapat memberikan manfaat dan memberikan pencerahan serta pemahaman di kalangan masyarakat.

Dalam skripsi ini akan mencoba melihat peran Hasan Al-Banna dalam merekonstruksi kembali Negara Islam yang dulunya menjadi kiblat dari negara-negara lain. Melalui pergerakan Ikhwanul Muslimin dan pemikiran politiknya Hasan Al-Banna akan mencoba mengembalikan peradaban Islam, dari semenjak

¹³ Abdul Hamid Al-Ghazali, *Op,cit.*, hal 35-36.

¹⁴ Muhith Muhammad Ishaq, *Op,cit.*, ,hal 39.

runtuhnya Kehalifahan Turki Utsmani hingga saat ini yang menjadikan negara-negara Islam terpecah menjadi berbagai macam negara . Dalam skripsi ini pula Hasan Al-Banna akan mencoba menerapkan dan menjadikan Al-Qur'an sebagai undang-undang sebagai landasan dalam negara Islam.

Pemikiran Hasan Al-Banna dalam skripsi ini mengenai bentuk suatu negara tidak mempertimbangkan dalam hal nama ataupun bentuk tetapi Hasan Al-Banna hanya lebih menekankan kepada kaidah-kaidah yang islami, jika kaidah-kaidah Islamiyah yang di terapkan di suatu negara maka negara apapun, di manapun dan apapun namanya maka dapat di katakan negara itu adalah negara Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis hendak mengajukan sebuah rumusan masalah, yakni: bagaimana Konsep pemikiran politik Hasan Al-Banna Tentang Ketatanegaraan?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pemikiran Politik Hasan Al-Banna tentang ketatanegaraan.
- b. Mengetahui Urgensi pemikiran Politik tentang ketatanegaraan menurut Hasan Al-Banna.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Praktis
 - 1) Memperkaya Khasanah pengetahuan sejarah terutama dalam sejarah perpolitikan Ikhwanul Muslimin dan Khususnya Pemikiran Hasan Al-Banna tentang Ketataegaraan.
 - 2) Menambah wawasan dan Ilmu pengetahuan bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.
 - 3) Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.
- b. Manfaat Teoritis

- 1) Menambah Khasanah penelitian pada Program Studi Hukum Islam.
- 2) Memberikan sumbangan bagi dunia ilmu pengetahuan dibidang sejarah perpolitikan khususnya pergerakan di Mesir.

D. Kajian Pustaka

Untuk mendukung dalam menelaah pemikiran Hasan Al-Banna tentang Ketatanegaraan, maka dalam hal dibutuhkan *litaratur-literatur* yang berkaitan dengan pemikiran Hasan al Banna seperti karya-karya berupa buku-buku, risalah, dan skripsi yang pernah di buat sebelumnya adapun karya-karya Hasan Al-Banna yang akan di jadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Skripsi

Skripis, Ade Juarsi, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung djati, Fakultas Syariah dan Hukum, yang berjudul Konsep Negara Menurut Ali Abdur Raziq dalam skripsi tersebut membahas tentang negara yang ideal adalah negara yang memperjuangkan humanisme universal yang memperjuangkan kedaulatan rakyat dan sosial.¹⁵

2. Buku

- a. Buku Karya Hasan Al-Banna “Majmu’ah Rasa’ilil Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna” jilid 1 & 2 dalam buku tersebut membahas masalah strategi pergerakan politik Hasan al Banna yang juga pula menjadi acuan dalam pergerakan gerakan IKhwanul Muslimin dalam menjalankan tujuannya.
- b. Buku karya Prof. Dr. Abdul Hamid Al Ghazali “*Haula asasiyat Al-Masyru’ Al-islami linahdhoh Al-umah*”, dalam buku tersebut adalah intisari dari karya-karya Hasan Al-Banna yang berjudul *Majmu’ah Rasa’ilil Imam Asy-*

¹⁵ Skripsi Ade Juarsi, *Konsep negara menurut Ali Abdur Raziq*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. Bandung.

Syahid Hasan Al-Banna menjelaskan secara ringkas dan terperinci metode dan sistem pergerakannya.¹⁶

- c. Visi peradaban komprehensif Al-Ikhwan Al-Muslimin dalam buku tersebut membahas sistem perpolitikan serta dasar-dasar yang menjadi acuan dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan kontemporer.¹⁷
- d. Buku karya Dr. Abdurrahman Al-Mursy Ramadhan "*Manhaj Islah*" dalam buku ini membahas masalah-masalah perbaikan sosial yang bermula dari perbaikan individu hingga perbaikan pemerintahan dalam mencapai tujuan berdirinya Islam sebagai peradaban.¹⁸
- e. Buku Karya Muhith Muhammad Ishaq "*Fiqih Politik Hasan Al Banna*" Dalam buku tersebut menjelaskan tentang teori politik di sertai pula bentuk amal politik, di dalam buku tersebut juga berisikan teori politik hingga politik praktis yang pernah dilakukan Hasan al Banna.¹⁹

E. Kerangka Teori

Pada zaman sekarang, dakwah islamiyah sangat membutuhkan "kampung Islam" atau "negara Islam" yang menjadikan risalah islamiyah sebagai aqidah dan sistem, ibadat dan moral, serta sebagai nilai-nilai kehidupan dan peradaban. Berdasarkan rislah itu, kehidupan negara tersebut di tegakkan, baik dari segi moril maupun materil. Negara ini juga membuka pintunya lebar-lebar bagi orang mukmin yang ingin berhijrah ke sana dari berbagai negeri kafir, kezaliman dan penyimpangan.

¹⁶ Abdul Hamid Al-Ghazali, "*pilar-pilar kebangkitan umat*", terj.khozin abu faqih. dan Fachrudin. (Jakarta timur: I'tishom cahaya umat 2011)

¹⁷ Visi peradaban komprehensif Jamaah Ikhwanul Muslimun. (Jakarta: Maktabah asy-Syamilah. 2015)

¹⁸ Abdurrahman Mursy Ramadhan, "*Manhaj Islah*" terj. Ust, jasiman dan Muhammad Amin rais, (Solo: era intermedia 2015)

¹⁹ Muhith Muhammad Ishaq, *Fiqih Politik Hasan Al-Banna*, (Jakarta: Rabbani press, 2012)

Mendirikan negara tersebut merupakan kebutuhan yang islami, dan juga merupakan kebutuhan insani. Sebab, negara itu akan menyuguhkan kepada umat manusia contoh hidup tentang kesatuan agama dan dunia, kemanunggalan moral dan materil, serta keserasian antara berkemajuan Peradaban dengan keluhuran moral. Hal itu merupakan batu pertama bagi bagunan negara Islam yang besar, yang menyatukan semua umat Islam dalam di bawah bendera Al-Qur'an dan di bawah khalifah islamiyah, akan tetapi, berbagai kekuatan yang menentang Islam mencurahkan segenap tenaganya dan berusaha mati-matian agar negara itu tidak terwujud dimana pun dan sekecil apapun di muka bumi ini.²⁰

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat itu. Dengan adanya Negara yang merupakan organisasi dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama.

Kehidupan bernegara merupakan suatu keharusan dalam kehidupan manusia yang bermasyarakat guna mewujudkan keteraturan dan agar mampu merealisasikan kepentingan bersama dalam bermasyarakat. Karena dengan adanya negara dengan perangkatnya mereka dapat memaksakan Sesuatu keinginan bersama demi kebaikan dan kemaslahatan bersama.²¹

Tidak semua pemikir tersebut membahas tentang proses terbentuknya negara. Hanya Ibnu Rabi, Al Mawardi, Al Ghazali dan Ibnu Khaldun yang membicarakannya. Tiga yang pertama hidup pada abad klasik dan satu yang terakhir hidup pada masa abad tengah.²²

Ibnu Rabi' memulai pembahasannya tentang negara atau kota (*al daulat au al-*

²⁰ Yusuf Qardhawy, *Op.cit.*, hal 25-26.

²¹ Amiruddin M. Hasbi, *Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman*, cet ke-1 (Yogyakarta: UI Press, 2000) hal. 87.

²² Suyuti J Pulungan, *Fiqih Siyash: ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 1999). Hal 217

madinat) berdasarkan kenyataan sosial, bahwa manusia adalah jenis makhluk yang saling memerlukan sesamanya untuk mencukupi segala kebutuhannya. Tidak mungkin seorang diri dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya tanpa ada bantuan atau berdampingan dari dan dengan orang lain. Karena itu, satu sama lain saling membutuhkan untuk mendapatkan kebutuhan hidup keinginan untuk mencukupi kebutuhan agar bertahan hidup, dan untuk memperolehnya memerlukan kerjasama, mendorong mereka berkumpul di suatu tempat, agar mereka bisa saling tolong menolong dan memberi. Proses itulah, menurut Rabi' yang membawa terbentuknya kota-kota, dan akhirnya menjadi negara.²³

Al-Mawardi juga berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial, tidak mungkin seorang mampu mencukupi hajat hidupnya sendirian, kecuali berhubungan dengan orang lain. Manusia itu kata Al-Ghazali, diciptakan oleh Allah tidak bisa hidup sendiri, ia butuh berkumpul dengan yang lain makhluk jenisnya itu. Itulah sebabnya Ibnu Khaldun juga berpendapat organisasi kemasyarakatan bagi umat manusia adalah suatu keharusan. Hal ini dinyatakan oleh para filosof bahwa manusia itu menurut tabiatnya adalah makhluk politik atau makhluk sosial. Organisasi kemasyarakatan itu, menurut istilah kaum filosof, disebut kota, *al-madinat* (Arab), polis (latin).²⁴

Menurut Plato, negara merupakan persekutuan hidup, “Di dalam suatu negara kamu semua bersaudara”. Negara terbentuk karena tidak seorangpun diantara kita yang sanggup mandiri, kita membutuhkan banyak hal. Aristoteles sebagai murid Plato berpendapat tidak jauh beda dengan gurunya.²⁵ Menurutunya, negara adalah komunitas keluarga atau kumpulan keluarga yang sejahtera demi kehidupan yang sempurna dan berkecukupan.²⁶

²³ *Ibid*, hal 218.

²⁴ *Ibid.*, hal. 219.

²⁵ Ridwan H.R, *Fiqih politik gagasan, harapan dan kenyataan*, cet-1 (Yogyakarta: FH UII Press 2000) hal. 21.

²⁶ *Ibid*, hal. 217.

Menurut Aristoteles, negara terbentuk secara bertahap dari tingkat pertama dan terendah yakni keluarga. Keluarga sebagai suatu bentuk persekutuan hidup amat perlu bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan material dan kebutuhan biologis sehari-hari. Keluarga selaku persekutuan hidup kedua, yang disebut desa. Proses terbentuknya desa berlangsung sesuai dengan kodratnya, sama seperti keluarga terbentuk. Desa sebagai persekutuan hidup kedua sangat penting bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya. Sesudah itu, desa tumbuh berkembang terus dan akhirnya menjadi polis (negara/kota). Lewat negara, manusia dapat mencukupi kebutuhannya sendiri (*autarkeia*) dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya bahkan dalam seluruh aspek hidup.²⁷

Negara adalah sekumpulan manusia yang tinggal menetap pada suatu wilayah tertentu yang diperintah oleh institusi pemerintahan, yang mengatur urusan mereka di dalam dan di luar. Menurut Roger H. Soltou, negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Sedangkan menurut Harold J. Laski, “ Negara adalah suatu masyarakat yang di integrasikan karena memiliki superioritas kewenangan yang bersifat memaksa terhadap individu atau kelompok masyarakat.”²⁸

Mac Iver mendefinisikan negara sebagai asosiasi yang menyelenggarakan penerbitan dalam suatu masyarakat dalam wilayah tertentu berdasarkan sistem hukum yang di jadikan oleh pemerintah yang dilekati kekuasaan memaksa berdasarkan definisi-definisi tersebut Miriam Budiarjo menyimpulkan bahwa negara merupakan suatu daerah territorial yang rakyatnya di perintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan yang monopolistis dari kekuasaan yang sah.²⁹

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Ridwan H.R, *Op,cit.*, hal 218.

F. Metode Penelitian

Metode sebagai suatu rumusan atau cara tertentu secara sistematis adalah untuk menanggapi dan mengkaji suatu masalah yang dimaksudkan agar sebuah karya ilmiah (dari suatu penelitian) dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dengan menggunakan metode ilmiah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini bersifat literatur atau penelitian kepustakaan, artinya obyek utama yang diteliti adalah buku-buku kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai adalah deskriptif. Yaitu dengan mengumpulkan informasi yang mengacu pada suatu keadaan seadanya pada saat dilakukannya penelitian. Serta menggali seluas-luasnya informasi tentang keadaan tersebut. Karena penelitian bersifat deskriptif maka dalam penulisan ini hanya menguraikan pendapat dari Hasan Al-Banna tentang Pemikiran Politik tentang ketatanegaraan.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam merumuskan masalah ini adalah pendekatan sosio-normatif dan historis. Sosiologis yaitu suatu proses terus menerus, kritis dan terorganisasi untuk menganalisis dan memberikan interpretasi atas fenomena sosial yang mempunyai hubungan saling berkaitan. Sedangkan histories yaitu membuat rekonstruksi secara sistematis dan obyektif dari kajian atau peristiwa di masa lalu dan cara mengumpulkan, mengevaluasi memverifikasi dan memsitensikan data menuju fakta dengan kesimpulan yang kuat. normatif pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, serta hukum-hukum yang menjadi landasan dalam berfikir (Al-Quran dan Sunnah)

4. Sumber data

Karena penelitian ini bersifat literatur maka teknik pengumpulan data yang akan dilakukan adalah mencari dan menelusuri sebanyak mungkin data-data yang di anggap selaras dengan apa yang akan di teliti. Adapun beberapa sumber yang akan di gali dalam penelitian ini diantaranya :

a) Sumber Primer :

Yaitu buku : Merupakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari sumber aslinya, memuat segala keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain Al-Quran, As-Sunnah dan karya-karya berupa buku yang berjudul: Majmu'ah Rasail al Imam Hasan Al-Banna, pilar-pilar kebangkitan umat, visi peradaban Ikhwanul Muslimun, manhaj islah, fiqh politik Hasan Al-Banna dan lain-lainya.

b) Sumber sekunder :

bahan ini merupakan hal yang berkaitan dengan objek yang akan di bahas. Karya-karya Buku lain tersebut yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan primer yang diambil dari sumber-sumber tambahan yang memuat segala keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain pendapat tokoh-tokoh lain tentang konsep sebuah negara sebagai bahan informasi tambahan yang relevan, buku-buku, dokumen, artikel, buletin, atau karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Sedangkan metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Metode Deduktif.

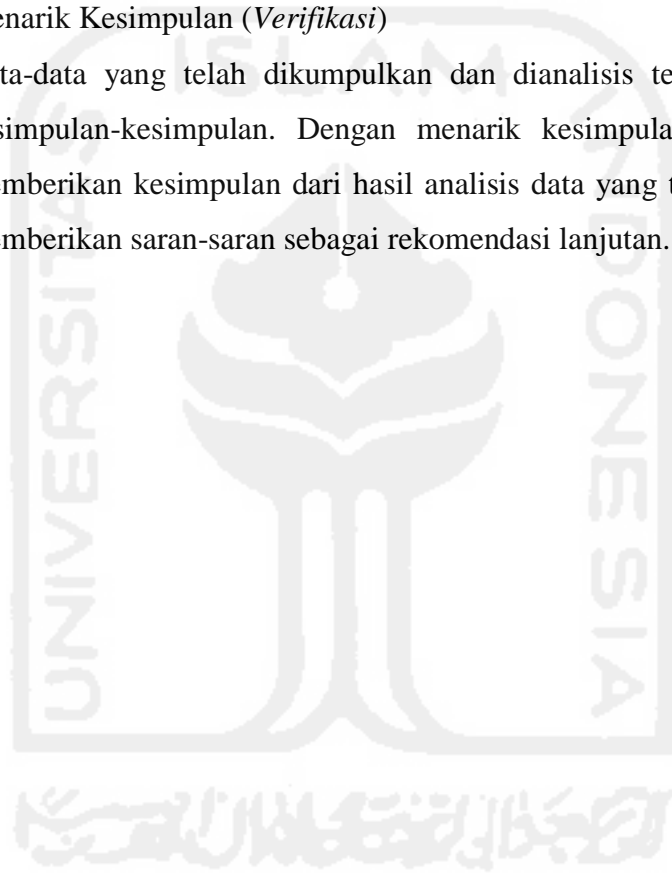
yaitu dengan cara menganalisis data umum dan kongkrit yang mempunyai kesamaan dan untuk di ambil suatu kesimpulan khusus.

b) Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah menyajikan data tersebut dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk narasi. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi atau data yang dapat menggambarkan permasalahan yang ada. Sehingga memudahkan peneliti dalam menguasai informasi atau data tersebut.

c) Menarik Kesimpulan (*Verifikasi*)

Data-data yang telah dikumpulkan dan dianalisis tersebut dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan. Dengan menarik kesimpulan ini peneliti akan memberikan kesimpulan dari hasil analisis data yang telah dilakukan serta memberikan saran-saran sebagai rekomendasi lanjutan.



G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penelitian ini dan supaya bisa di pahami secara runtut penulis akan menggunakan pokok-pokok pembahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab, maka kerangka penulisanya tersusun sebagai berikut:

Bab Satu merupakan pendahuluaan yang berisi latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab Dua berisi tentang Tinjauan Umum Tentang Negara berupa pandangan para filusuf barat mengenai negara, kemudian ada pula, negara dalam pandangan Islama serta kaitanya Islam dan negara.

Bab Tiga berisi tentang biografi Hasan Al-Banna berupa riwayat hidup dan pendidikan, pengalaman dan pendidikanya serta karya-karya yang di hasilakan selama hidupnya serta kondisi sosial politik yang terjadi di zamanya di Mesir.

Bab Empat berirsi tentang Analisis Pemikiran Hasan Al-Banna dan landasan pemikiran Hasan Al-Banna serta langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang di inginkan.

Bab Lima berisi tentang kesimpulan dan saran.